

Kepada Yth

Semua Pihak Terkait

## **Informasi tentang pelaksanaan "Kampanye untuk Menghilangkan Praktik Curang" yang terkait dengan Skema Pemagangan Teknis dan Skema Keterampilan Khusus Tahun 2024**

Asosiasi Nasional untuk Komunitas Global & Berpikiran Terbuka  
(NAGOMi)

**Badan pengawas, organisasi pendukung yang terdaftar, perusahaan penerima, organisasi pengirim, dan pekerja asing, mohon bekerja sama dalam memerangi penipuan demi mempekerjakan pekerja asing secara layak.**

1. (1) Pada tanggal 9 Februari 2024, pertemuan tingkat menteri terkait memutuskan kebijakan Pemerintah untuk mengubah kedua sistem tersebut (tanggapan Pemerintah sehubungan dengan laporan akhir Kelompok Pakar tentang Keadaan Sistem Pemagangan Teknis dan Sistem Keterampilan Khusus), dan pada tanggal 15 Maret di tahun yang sama, sebuah RUU untuk mengubah sebagian Pengelolaan Imigrasi dan UU Status Pengungsi dan UU tentang Pelaksanaan yang Tepat dari Pemagangan Kerja Teknis untuk Orang Asing dan Perlindungan Peserta Pemagangan Kerja Teknis telah diajukan ke Parlemen, dan telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 21 Mei.

(2) Salah satu alasan di balik revisi sistem tersebut adalah adanya kritik dari dalam dan luar negeri mengenai seringnya terjadi laporan pelanggaran hak asasi manusia (pelecehan verbal, kekerasan, tidak dibayarkannya gaji, dan lain-lain) dan seringnya terjadi kasus pekerja asing kabur yang berhubungan dengan sistem pelatihan teknis. Oleh karena itu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Orang Asing" dan "Pengembangan Karir Orang Asing" secara khusus disebutkan dalam visi peninjauan sistem baru.

2. (1) Dalam dunia bisnis, di bawah bendera "Bisnis dan Hak Asasi Manusia", perlu

adanya jaminan dan sosialisasi bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasok (*Human Rights Due Diligence* yang selanjutnya disebut “*Human Rights DD*”). Banyak negara Barat telah memberlakukan UU (misalnya "UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur" di Amerika Serikat dan "UU Rantai Pasokan" di Jerman) untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran hak asasi manusia seperti kerja paksa dan pekerja anak, dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pelarangan impor dan boikot produk.

(2) Meskipun belum disahkan di Jepang, pemerintah membuat "Rencana Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia" pada tahun 2020, dan pada bulan April 2023, pemerintah menjadikan "*Human Rights DD*" sebagai persyaratan dalam pekerjaan umum dan pengadaan pemerintah pada bulan April 2023.

Di sektor swasta, Pada tahun 2021 Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) membuat “Buku Panduan Manajemen yang Menghormati Hak Asasi Manusia” untuk mendorong reformasi kesadaran perusahaan dan inisiatif sukarela. Nissho (*The Japan Chamber of Commerce and Industry*) dan Tossho (*Tokyo Chamber of Commerce and Industry*) juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya *Human Rights DD* melalui seminar dan kegiatan lainnya. Hasil dari kegiatan tersebut adalah jumlah perusahaan yang mempraktikkan *Human Rights DD* terus meningkat.

Pada tahun 2022, masalah tunjangan lembur yang tidak dibayar untuk 11 pekerja magang Vietnam di sebuah perusahaan jahit di Ehime terungkap, dan raksasa pakaian Wacoal, yang telah melakukan pemesanan produksi, memberikan kompensasi uang sebesar 5 juta yen sebagai sumbangan kepada kelompok pendukung pekerja magang tersebut, dan department store Hankyu serta Hanshin memutuskan untuk berhenti menjual pakaian yang diproduksi berdasarkan pesanan dari perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, menurut laporan media, mulai Juli 2023 dan seterusnya, tiga bank besar Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, dan Mizuho akan secara ketat menyaring pinjaman mereka untuk memastikan bahwa tidak ada kerja paksa atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya dalam rantai pasokan mereka.

3. (1) Masalah penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja di Jepang menjadi semakin serius, mempromosikan investasi modal (konversi DX) dan secara bersamaan menjadi negara yang 'dipercaya dan dipilih' oleh tenaga kerja asing adalah masalah penting yang akan mempengaruhi masa depan Jepang. Tetapi depresiasi yen selama dua tahun terakhir telah mengurangi daya tarik Jepang.

(2) Untuk menjadi negara yang dipercaya dan dipilih oleh sumber daya manusia asing, dibandingkan yang lain penting untuk merevitalisasi perekonomian Jepang dan meningkatkan upah, namun kita juga telah memasuki era di mana sangatlah penting untuk

sebanyak mungkin mengurangi kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk mencapai hal ini, penting untuk "Menetapkan penyelesaian yang cepat dan efektif" ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi, dan "menerapkan hukuman tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran".Isu penting lainnya adalah penghapusan atau pengurangan pungutan biaya dari tenaga kerja asing, seperti yang dianjurkan oleh Pemerintah Vietnam dan ILO, dengan tujuan untuk mengurangi utang, yang merupakan faktor penyebab tenaga kerja kabur. Selain itu, dari sudut pandang keamanan Jepang (untuk menghindari terciptanya tenaga kerja yang anti-Jepang), penting juga untuk menciptakan lingkungan yang membuat tenaga kerja asing merasa senang datang ke Jepang (termasuk pengembangan karier di bidang keterampilan tertentu).

4. (1) Setelah musim semi, pasca-Corona tahun 2022, pengulangan/penyebaran suap dan penjamuan yang berlebihan dari organisasi pengirim ke badan pengawas yang telah menurun, menjadi mulai terdengar kembali. Selain itu, dilaporkan adanya peningkatan jumlah "warga negara palsu/insinyur" yang berdasarkan dokumen palsu dan aplikasi palsu dalam kategori "insinyur, spesialis humaniora, dan layanan internasional". Selain itu, di bidang keterampilan khusus, broker jahat sudah beroperasi di belakang layar, dan memberantas mereka merupakan masalah yang mendesak. Jumlah permintaan bantuan dari warga negara asing dari berbagai negara yang bekerja di bawah sistem keterampilan khusus semakin meningkat, termasuk dari organisasi pendukung nasional di Jepang.

(2) Peran "Pemerintah Jepang" dan "Pemerintah negara pengirim" sangat penting dalam menangani masalah ini, tetapi kesadaran dan upaya dari "Pihak Jepang" (Badan pengawas, Organisasi pendukung yang terdaftar, dan Perusahaan penerima tenaga kerja asing) dan "Pihak-pihak di pihak negara pengirim" (organisasi pengirim dan tenaga kerja asing yang datang ke Jepang) juga sangat penting.

Dari perspektif ini, kami akan mempromosikan “**Kampanye untuk Menghilangkan Praktik Curang**” terkait Skema Pemagangan Teknis dan Skema Keterampilan Khusus selama periode satu tahun yang dimulai dari Bulan Juni 2024.

Tanpa mengurangi rasa hormat, kami meminta kerja sama dari semua pihak terkait.